

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memegang peran krusial yang berkontribusi besar terhadap perkembangan beserta kemajuan bangsa (Inanna, 2018). Pendidikan memiliki visi untuk melahirkan generasi siswa Pancasila yang kritis, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, mengutamakan gotong royong, serta menjunjung kebhinekaan global. Retetan visi tersebut demi terwujudnya Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Pendidikan diharapkan dapat menghasilkan individu yang menunjukkan perilaku, kemampuan, disertai dengan keunggulan kompetensinya. Harapan dari adanya pendidikan yakni mampu menghasilkan individu yang pandai, cakap, kreatif, percaya diri, hingga berakhlak mulia.

Kemajuan dalam Pendidikan adalah salah satu bukti bangsa yang besar. Negara yang memiliki sistem Pendidikan yang baik memiliki kemampuan untuk menghasilkan penerus yang kompeten yang dapat bersaing dengan negara lain, baik di Tingkat nasional maupun intrnasional (Hermanto, 2020). Sulit untuk menghindari persaingan yang meluas yang disebabkan oleh globalisasi di setiap aspek kehidupan, terutama di bidang Pendidikan. Institusi Pendidikan yang ada di Indonesia diperlukan untuk menghasilkan penerus bangsa yang kompetitif dan mempunyai kemampuan yang besar (Rozak, 2021). Hal ini diharapkan bahwa setiap individu

memiliki kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk berusaha dalam mengoptimalkan kualitas Pendidikan di Indonesia.

Ada kemungkinan bahwa pertumbuhan mutu Pendidikan di Indonesia masih rendah (Oktavia, 2019). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada Tahun 2022 angka putus SD mencapai 0,13% atau naik 0,01%, SMP 1,06%, atau naik 0,16% dari tahun sebelumnya, dan SMA 1,38% atau naik 0,26% dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa angka putus sekolah telah meningkat sebagai akibat dari perluasan akses Pendidikan, tetapi ini tidak sebanding dengan peningkatan hasil belajar siswa. Hasil survey PISA pada tahun 2022 dapat dikategorikan termasuk yang terendah. Penilaian yang didapatkan adalah 371 untuk membaca, bidang matematika memperoleh 379 skor, dan sains mendapatkan 398. Sebagian siswa masih belum memenuhi nilai standar minimal pada ketiga bidang yang telah ditentukan. Sebagai contoh, 70% siswa belum mampu memenuhi nilai minimum yang ditetapkan untuk bidang membaca, 71% di bidang matematika, serta 60% siswa belum mencapai skor minimal di bidang sains.

Ketidakseimbangan dalam mutu pendidikan antarwilayah terus menjadi persoalan yang penting guna mencapai pemerataannya pendidikan (Rahmah, 2023). Dengan total 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, Indonesia memiliki keberagaman dalam aspek sosial ekonomi, geografi, dan kelembagaan di setiap wilayahnya, kondisi ini mempengaruhi kemampuan setiap daerah dalam menerapkan kebijakan. Kekhawatiran tentang politisi dalam pengelolaan Pendidikan muncul sebagai akibat dari

desentralisasi layanan Pendidikan ke pemerintah daerah yang berbeda ini. Studi yang dilakukan (Rosser & Fahmi, 2018) menemukan bahwa perbedaan kualitas Pendidikan di Indonesia terutama disebabkan oleh pendanaan yang tidak memadai, defisit sumber daya manusia antar daerah struktur intensif yang salah, dan manajemen pengelolaan yang buruk. Misalnya, praktik politik kekuasaan di Tingkat daerah terkait erat dengan penyediaan dan pengelolaan sumber daya serta pengangkatan dan pengelolaan guru.

Selain masalah kesenjangan mutu kualitas Pendidikan antardaerah, kompetensi guru di Indonesia juga kurang baik. Menurut (Arifa & Prayitno, 2019) kualitas guru menentukan kualitas pendidikan suatu negara. Guru harus memenuhi kompetensi dan kualifikasi yang memenuhi standar Pendidikan nasional sebagai pendidik di jenjang dasar, menengah, dan usia dini. Menurut penelitian (Tintigon, 2023), banyak guru yang tidak memiliki sertifikat profesional. Program Prajabatan PPG harus memulai proses yang sistematis untuk memilih calon guru profesional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, menetapkan bahwa pola sertifikasi guru dalam jabatan digantikan dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program ini dapat membangun pendidik yang menguasai kompetensi dasar profesi guru. Dengan demikian, mereka dinyatakan memenuhi kelayakan dan kesiapan guna menjalani profesi guru profesional.

Selain PP tentang Guru, UU Guru dan Dosen menetapkan standar untuk kualifikasi dan kompetensi guru. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun

2005 mengenai Guru dan Dosen menyatakan bahwa seorang guru wajib memenuhi kualifikasi akademik, memiliki kompetensi, sertifikat pendidik, kondisi fisik dan mental yang sehat, serta kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Profesionalitas guru diharapkan dapat menyelenggarakan proses pendidikan yang baik serta menghasilkan keluaran pendidikan berkualitas melalui persyaratan minimal ini.

Negara-negara berkembang mengalami peningkatan akses ke Pendidikan, tetapi tidak diikuti oleh peningkatan kualitas pembelajaran. Menurut (Yulianti, 2023) menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan siswa di banyak negara berkembang gagal belajar. Pertama, akses terbatas yang disebabkan oleh jarak geografis, kekurangan infrastruktur dan fasilitas Pendidikan, dan biaya pendidikan yang tinggi. Kedua, kualitas Pendidikan rendah, disebabkan oleh kekurangan sumber daya, pelatihan guru yang tidak memadai, dan standar Pendidikan yang rendah. Ketiga, kurangnya dana. Keempat, kurangnya sumber daya pembelajaran dan teknologi.

Kebijakan seperti sekolah model, RSBI, dan sekolah rujukan membantu meningkatkan kualitas Pendidikan di banyak wilayah (Yuhansil, 2020). Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan contoh bagi sekolah lain di sekitarnya. Meskipun memiliki kemampuan untuk mendorong penyediaan layanan Pendidikan yang baik, situasi tersebut belum memungkinkan terciptanya pengaruh yang lebih besar hingga merata di berbagai wilayah. (Linda, 2023) mengatakan bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan keterbatasan ini. Yang pertama adalah bahwa upaya intervensi kerap diarahkan pada lembaga pendidikan yang telah

menunjukkan kualitas yang baik, yang menyebabkan perbedaan kualitas di antara satuan Pendidikan lain yang lebih rendah. Kedua, disebabkan oleh bantuan yang mayoritas berfokus pada dukungan finansial dan fisik, proses mempengaruhi sekolah lain sulit dilakukan. Ketiga, sistem yang ada di Tingkat nasional dan regional tidak cukup untuk menjamin bahwa Upaya peningkatan kualitas yang sedang dijalankan akan bertahan lama. Singkatnya, tidak ada peraturan yang menjamin keberlanjutan program di tingkat nasional dan belum ada Upaya nya di tingkat daerah demi mengimplementasikan serta mengembangkan program lebih lanjut. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, apabila dilengkapi dengan aturan, kebijakan, serta pendanaan yang konsisten, dapat mendorong pengembangan kualitas.

Demi meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia, surat edaran nomor 1 tahun 2020 oleh Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), membahas kebijakan Merdeka Belajar ataupun disebut Kebebasan Belajar. Kebebasan dalam institusi pendidikan serta pembelajaran memungkinkan siswa mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Diterimanya konsep ini menjadi bagian dari tujuan masa depan Pendidikan Indonesia yang ingin membentuk manusia dengan kualitas tinggi yang dapat berkompetisi di banyak bidang kehidupan.

Program sekolah penggerak berusaha mencapai visi Pendidikan Indonesia demi menjadikan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, hingga berkepribadian lewat penciptaan pelajar Pancasila. Sejumlah sekolah

memprioritaskan peningkatan kualitas hasil pembelajaran siswa yang menyeluruh dengan membuat profil pelajar Pancasila dari berbagai kemampuan hingga sifatnya. Program diawali dengan kehadiran keunggulan sumber daya manusia, yaitu kepala sekolah beserta gurunya (Syafi'i, 2021). Tujuan program sekolah penggerak adalah mendorong institusi Pendidikan melakukan perubahan internal untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Fauzi, 2022). Untuk memungkinkan sekolah sekitar melakukan peningkatan yang sama, mereka ditargetkan untuk melakukan pengimbasan agar program tersebut dapat didistribusikan sama rata di seluruh sekolah Indonesia. Agar program ini dapat bertahan, pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan harus bekerja sama dengan baik. Hasil belajar di tingkat sekolah, regional, dan nasional dapat mengalami peningkatan yang konsisten jika program ini didukung oleh regulasi, kebijakan, dan dana yang mencukupi.

Sekolah penggerak mulai beroperasi pada Februari 2021. Kemendikbudristek menganjurkan kurikulum belajar bebas, dan program ini merupakan salah satu proyeknya. Setelah program diluncurkan dan menetapkan satuan Pendidikan yang berhak mengikutinya, SD Insan Amanah Malang menjadi bagian dari kemendikbudristek untuk melaksanakan program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak telah digunakan di 514 kabupaten/kota dan 40.000 tempat Pendidikan pada tahun akademik 2024/2025. Program ini berkembang secara bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga menjadi program sekolah penggerak.

Dari hasil observasi yang dilakukan bersama kepala sekolah, bahwa program sekolah penggerak di SD Insan Amanah Malang telah dimulai sejak tahun 2023. Program ini diterapkan dari kelas satu hingga enam. Saya memilih program sekolah penggerak karena program ini adalah komponen ekosistem pendidikan, sehingga setiap sekolah akan menjadi sekolah penggerak dalam jangka panjang. Kendala yang dihadapi di sekolah tersebut adalah guru sulit konsisten dalam mengajar. Guru masih kesulitan untuk mengikuti rencana yang telah ditetapkan dalam mengajar seperti pembelajaran berpusat pada murid.

Hasil wawancara bersama kepala sekolah di SD Insan Amanah Malang didapatkan hasil bahwa penerapan program sekolah penggerak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah. Mulai dari memberikan pendampingan konsultif dan asimetris, penguatan SDM, pembelajaran paradigma baru, perencanaan manajemen sekolah berdasarkan refleksi diri, dan digitalisasi sekolah. Kualitas pendidikan mengalami peningkatan dari sisi kreativitas dan layanan atau kurikulum. Hal ini ditunjukkan oleh antusiasme siswa terhadap Pelajaran karena sekolah menyediakan proyektor LCD di setiap kelas. Guru semakin terdorong untuk melahirkan inovasinya merancang keefektifan pembelajaran dengan diusungnya tema profil pelajar Pancasila. Selain itu, sekolah juga menyediakan *e-learning* yang bisa diakses diluar sekolah. *E-learning* berisi modul ajar, materi, dan soal-soal yang telah dipeajari di sekolah sehingga siswa bisa mempelajarinya lagi di rumah.

Penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu oleh Sarlin Patilima berjudul sekolah penggerak sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. Keluaran dari Penelitian tersebut ditunjukkan dari adanya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dicapai dari implementasi program sekolah penggerak. Program ini membantu mengembangkan dan membentuk profil pelajar Pancasila terkait keterampilan kognitif dan nonkognitif dengan guru dan kepala sekolah yang unggul.

Penelitian ini dilakukan karena program sekolah penggerak telah dimulai di SD Insan Amanah Malang. Tujuan diselenggarakannya penelitian yaitu tahu bagaimana program dilaksanakan guna mengoptimalkan kualitas Pendidikan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi sekolah dan guru lainnya untuk berpartisipasi dalam program sekolah penggerak pada tahap berikutnya, dengan harapan dapat mencapai peningkatan dan pemerataan kualitas Pendidikan.

Berdasarkan kondisi yang diuraikan diatas, peneliti mengangkat judul “Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Optimalisasi Kualitas Pendidikan di SD Insan Amanah Malang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang dan judul yang tertera, maka rumusan masalah meliputi :

1. Bagaimana implementasi program sekolah penggerak dalam optimalisasi kualitas Pendidikan di SD Insan Amanah Malang ?

2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Optimalisasi Kualitas Pendidikan Di SD Insan Amanah Malang ?
3. Bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat dalam Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Optimalisasi Kualitas Pendidikan Di SD Insan Amanah Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk dari perumusan masalah yang tertera, penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan:

1. Guna memaparkan bagaimana program sekolah penggerak diimplementasikan dalam optimalisasi kualitas Pendidikan di SD Insan Amanah Malang
2. Guna memaparkan sejumlah faktor yang mempengaruhi kelancaran dan hambatan dalam implementasi program sekolah penggerak di SD Insan Amanah Malang
3. Guna memaparkan tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan program sekolah penggerak di SD Insan Amanah Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan membawa harapan terhadap bertambahnya wawasan ilmu terkait cara menerapkan program Pendidikan, termasuk program sekolah penggerak. Ini juga akan berfungsi sebagai sumber informasi atau referensi bagi para peneliti yang ingin mengikuti penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Sebagai panduan ataupun petunjuk dari berlangsungnya program sekolah penggerak.

b. Bagi Guru

Sebagai referensi atau informasi tentang program sekolah penggerak dan sumber referensi untuk mengetahui bagaimana program tersebut berjalan.

c. Bagi Peneliti

Sebagai referensi untuk peneliti yang ingin meningkatkan pengetahuan mereka tentang dunia Pendidikan, terutama programsekolah penggerak.

E. Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang dipakai pada penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penelitian terfokus pada implementasi program sekolah penggerak dalam optimalisasi kualitas Pendidikan di SD Insan Amanah
2. Penelitian terfokus pada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program sekolah penggerak di SD Insan Amanah
3. Penelitian terfokus pada Upaya mengatasi faktor penghambat dalam implementasi program sekolah penggerak di SD Insan Amanah

F. Penjelasan Istilah

1. Program Sekolah Penggerak

Dikenal sebagai program yang dimaksudkan guna memperkuat kemampuan peserta didik dengan menyeluruh. Jadi semua keterampilan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik akan dikembangkan dalam program ini. Pengembangan tersebut dimulai dengan kemampuan kepala sekolah dan guru dalam manajemen sekolah, desain pembelajaran, dan hal lainnya. Program ini bertujuan untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Selain itu, pengimbasan program ini akan ditargetkan pada sekolah-sekolah di sekitarnya, yang akan membantu mencapai visi dan peningkatan kualitas Pendidikan Indonesia.

2. Kualitas Pendidikan

Kualitas Pendidikan memanfaatkan sumber Pendidikan untuk meningkatkan kemampuan siswa. Pendidikan berkualitas harus adil, inklusif, dan dapat diakses oleh semua siswa. Pendidikan juga harus mendorong kreativitas, pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan keterampilan sosial dan emosional. Ini adalah proses seumur hidup yang membantu seseorang mencapai potensi penuh mereka dan beradaptasi dengan lingkungannya yang berubah, mempengaruhi Masyarakat, dan mencapai potensi penuh mereka. Pendidikan yang baik membantu dalam proses ini dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab sosial.